# BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. **Gambaran Umum Tentang BPRS Al Washliyah**

# Sejarah BPRS Al Washliyah

Al Jam’iyatul Washliyah atau lebih dikenal dengan Al Washliyah, merupakan sebuah oerganisasi Islam yang didirikan di kota Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 30 November 1930. Sejarah Berdirinya Al Washliyah ini didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda, dimana para pendiri organisasi Al Washliyah juga ikut berpartisipasi dalam melawan para penjajah. Banyak tokoh-tokoh besar Al Washliyah ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi syahid.1

Sampai saat ini, Al Washliyah menjadi Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam yang bersifat sosial dan memiliki tujuan untuk mengamal ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, organisasi ini juga serta merta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, aman, damai, adil, makmur, dan diridhai oleh Allah SWT dalam negara Indonesia yang didasarkan dengan Pancasila.

Saat ini, kantor Pengurus Besar (PB) Al Washliyah berdomisili di Jalan Jend Ahmad Yani, No. 41, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510.2 PB

1 Admin Univa Labuhanbatu, “*Mengenal Lebih Dekat Al Jam’iyatul Washliyah*”, [https://univa-labuhanbatu.ac.id/mengenal-lebih-dekat-al-jamiyatul-washliyah/,](https://univa-labuhanbatu.ac.id/mengenal-lebih-dekat-al-jamiyatul-washliyah/) (diakses pada Sabtu, 1 Juli 2023, pukul 21.01 WIB).

2 Munthe, “Perjalanan Sejarah Kantor PB Al Washliyah di Tanah Betawi”, [https://kabarwashliyah.com/2022/11/29/perjalanan-sejarah-kantor-pb-al-washliyah-di-tanah-](https://kabarwashliyah.com/2022/11/29/perjalanan-sejarah-kantor-pb-al-washliyah-di-tanah-betawi/) [betawi/,](https://kabarwashliyah.com/2022/11/29/perjalanan-sejarah-kantor-pb-al-washliyah-di-tanah-betawi/) (diakses pada Kamis, 20 Juli 2023, pukul 19.41 WIB).

Al Washliyah sendiri saat ini ada di bawah kepemimpinan seorang Ketua Umum yaitu Dr. H. Masyhuril Khamis, S.H., M.H.

Setelah Pengurus Besar, di bawahnya ada Pengurus Wilayah. Untuk Pengurus Wilayah (PW) tingkat Provinsi Sumatera Utara, kantor PW Al Washliyah beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja No.144, Pasar Merah Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20213. Di mana saat ini ketua umum PW Al Washliyah adalah Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P.



# Gambar 1. Kantor Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Selain itu, Al Washliyah juga mengembangkan usaha dan kegiatan untuk mewujudkan tujuannya. Ada lima macam usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini yang merupakan Panca Amal Al Washliyah, yaitu:

* + 1. Pendidikan dan kebudayaan;
		2. Dakwah dan kaderisasi;
		3. Amar makruf nahi munkar;
		4. Panti asuhan dan fakir miskin; dan
		5. Ekonomi dan kesejahteraan umat.

Dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan resmi lembaga- lembaga pendidikannya adalah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan (MPK). Di bawah bidang pendidikan dan kebudayaan, Al Washliyah memiliki sekolah dan universitas. Dalam bidang dakwah dan kederisasi, Al Washliyah memiliki organisasi IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah), HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al Washliyah), IGDA (Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah), dan sebagainya. Dalam bidang panti asuhan dan fakir miskin, Al Washliyah memiliki panti asuhan Al Washliyah. Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan umat, Al Washliyah memiliki sebuah bank pembiayaan yaitu BPRS Al Washliyah.

Sedikit kilas balik tentang BPRS Al Washliyah yang masih aktif beroprasional sampai saat ini. BPRS Al Washliyah sendiri didirikan pada periode I dan beroperasi sejak tanggal 08 November 1994. Pada awalnya, BPRS Al Washliyah beralamatkan di Jln. Perintis Kemerdekan No. 151A

Tanjung Morawa. Peresmian tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara yang saat itu adalah H. Raja Inal Siregar dengan menetapkan H. Suprapto sebagai direktur utama dan Ir. H. Muh. Arifin Kamdi, M.Si, H. Muslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E, dan H. Murat Hasyim sebagai komisaris.

Pada periode selanjutnya yaitu periode II, dibentuk nama struktur organisasi yang baru yaitu: H. T. Kholisbah sebagai direktur utama, serta Ir.

H. Muh. Arifin Kamdi, Msi, H. Muslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E, dan Drs. H. Miftahuddin MBA ditetapkan sebagai komisaris. Kemudian.

Pada periode III tepatnya pada tanggal 02 April 2003, kantor BPRS Al Washliyah berpindah ke Jl. SM. Raja No. 51D Simpang Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang saat itu adalah H. T. Rizal Nurdin. Sebagai direktur utama adalah Bapak Hidayatullah, S.E dan sebagai komisaris adalah Bapak Ir. H.M. Arifin Kamdi, M.Si, serta Bapak Drs. H. Miftahuddin M.B.A. Sejak saat itu, bank menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba.

Sejak tahun 2013, BPRS Al Washliyah memiliki gedung kantor baru di Jl. G. Krakatau No. 28 Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang saat itu adalah H. Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn, dan Drs. H. Miftahuddin M.B.A ditetapkan sebagai komisaris. Pihak Dewan Pengawas Syariah saat itu adalah

Dr. H. Ramli Abd. 39 2 Wahid. M.A. Dan yang menjabat sebagai direktur utama ialah H.R. Bambang Risbagio, S.E dan Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai direktur operasional.

# Visi dan Misi BPRS Al Washliyah Medan

* + 1. Visi

Visi merupakan tujuan utama atau *main idea* dari didirikannya suatu organisasi atau lembaga dan perusahaan.

Adapaun visi dari BPRS Al Washliyah ialah menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat.

* + 1. Misi

Misi adalah proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut

Adapun misi dari BPRS Al Washliyah ialah memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan dan menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama

# Tujuan BPRS Al Washliyah Medan

Dalam KBBI, tujuan bermakna sebagai arah atau Haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi

dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan

Adapun tujuan utama manajemen BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan *falah oriented*.

# Produk BPRS Al Washliyah

Menurut Tjiptono, produk merupakan segala sesuatu yang diterima konsumen dalam proses pertukaran dengan produsen, berupa manfaat pokok, produk fisik dan kemasannya, serta elemen-elemen tambahan yang menyertainya.

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah semua yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, perolehan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Pada BPRS Al Washliyah, terdapat 2 (dua) jenis produk pada kegiatan perusahaan. Kedua produk tersebut adalah:

# Produk Dana

* + - 1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah suatu produk tabungan berupa titipan dana nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana titipan ini.

Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabab adalah suatu simpanan nasabah yang dikelola oleh bank guna memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp10.000 dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

* + - 1. Deposito Murabahah

Deposito murabahah adalah simpanan berupa investasi berbentuk tabungan yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

# Produk Pembiayaan

* + - 1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

* + - 1. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama.

* + - 1. Pebiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah sebuah akad jual beli suatu barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin

atau keuntungan yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

* + - 1. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

* + - 1. Ijarah/Muntahiyah Bittamlik

Ijarah atau muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa.

* + - 1. Transaksi Multijasa

Transaksi multijasa adalah piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan mengunakan akad ijarah atau kafalah.

* + - 1. Rahn

Rahn adalah menyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

* + - 1. Qardh

Qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, serta sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

* + - 1. Qardhul Hasan

Qardhul hasan merupakan akad perjanjian yang dibut khusus oleh pemberi dana atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada sipeminjam, dan si peminjam

berjanji akan segera mengembalikan semua barang yang dipinjaminya.3

# Struktural BPRS Al Washliyah Medan

Dalam suatu organisasi, struktuk organisasi wajib ada. Struktur organisasi adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas tiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Tujuan struktur organisasi dalam suatu perusahaan yaitu agar setiap individu menjadi lebih bertanggungjawab atas jabatan yang diemban olehnya. Adanya struktur organisasi perusahaan juga bisa membuat alurasi dan koordinasi kerja menjadi lebih jelas.

Manfaat dari adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah:

* + 1. Terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik;
		2. Efisiensi oprasional;
		3. Meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan; dan
		4. Meningkatkan produktifitas karyawan dan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, BPRS Al Washliyah sendiri memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dalam BPRS Al Washliyah Medan digambarkan sebagai berikut:

3 Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h.

650.



# Gambar 2. Struktural BPRS Al Washliyah Medan

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa ada cukup banyak jabatan dalam struktural BPRS Al Washliyah Medan yang diduduki oleh orang-orang terpilih. Jika dirincikan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Pengawas Syariah;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Oprasional;
5. Audit Internal;
6. Kepala Group Oprasional/Marketing;
7. Account Officier;
8. Remedial;
9. Personalia/Umum;
10. Bagian Umum;
11. Pembiayaan;
12. Adm Pembiayaan;
13. Slik;
14. Appraisal;
15. Akuntan;
16. Jasa Nasabah;
17. Teller Kantor Pusat;
18. Teller Kantor Kas Univa; dan
19. Teller Kantor Kas PW AW.

# Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum

* 1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan berasal dari kata lindung yang dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti (1) menempatkan dirinya di bawah (d balik, di

belakang); (2) berada di tempat yang aman; (3) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi; (4) minta pertolongan kepada yang kuada supaya selamat4. Dalam bahasa Inggris, perlindungan adalah *protection* yang berarti (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.5

Adapun pengertian hukum menurut M.H Tirta Atmidjaja ialah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku sehari-hari dengan ancaman harus mengganti kerugian, jika dilanggar akan membahayakan diri sendiri atau harta.

J. van Kan mengartikan hukum lebih singkat, hukum adalah keseluruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan setiap orang di dalam lingkup masyarakat.

Utrecht juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5 Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari dua kata yang sudah dipaparkan di atas, lalu muncullah satu kalimat baru yang disebut dengan perlindungan hukum. Berbagai ahli memiliki pendapat masing-masing atas perlindungan hukum tersebut. Berikut akan dipaparkan pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.6

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.7

Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya supaya hak-hak masyarakat sebagai warga negara tidak dilanggar dan untuk orang-orang yang melanggar akan dikenakan sanksi sesui dengan peraturan yang telah berlaku. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada

subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.8

6 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

7 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

8 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 10.

Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah sebuah usaha yang dilakukan setia orang atau suatu lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk menciptakan keamanan serta pemenuhan kesejahteraan kehidupan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut Hardjono perlindungan hukum ialah suatu perlindungan dengan memakai fasilitas hukum ataupun perlindungan yang diberikan oleh hukum guna kemudian diperuntukan kepada perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan tertentu, yakni dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu guna dilindungi tersebut dalam suatu hak hukum.9

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai aksi maupun upaya guna melindungi warga dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, guna mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman sehingga hal tersebut membolehkan manusia guna menikmati martabatnya selaku manusia.10

Selain dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan oleh para ahli di atas, pengertian perlindungan hukum juga tertuang dalam beberapa peraturan perundangan-undangan, antara lain pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta pada Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

9 Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 357.

10 Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum),* (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.11

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.12

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.13

Tangga.

11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap

Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seorang untuk terletak dalam perlindungan secara hukum serta hak atas rasa nyaman. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.14

Isi pasal tersebut di atas bermaksud jika tiap warga Negara berhak atas perlindungan dari Negara baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat serta harta benda yang ia miliki di bawah kekuasaannya. Tiap orang memiliki hak atas rasa nayamn serta perlindungan dari terdapatnya ancaman untuk berbuat ataupun berperan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tiap warga negara mereka untuk hidup dan menerima perlindungan hukum atas segala bentuk diskriminasi harus dijaga.15

# Bentuk Perlindungan Hukum

14 Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15 Lihat: Deniansyah Damanik dan Eka Syafrina Monica pada *Progresivitas Hukum di Indonesia Teori dan Praktik Penerapan Prinsip Syari’ah di Era Digitalisasi*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022), Cet.I, h.86.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif berarti pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

# Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum akan terwujud bila Undang-Undang selaku instrument serta penegak hukum berperan sebagai langkah guna

merealisasikan instrument tersebut saling bekerjasama dengan baik. Ada 4 (empat) faktor perlindungan hukum, yaitu:

* + 1. Terdapat perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya;
		2. Adanya jaminan kepastian hukum;
		3. Berkaitan dengan hak-hak sebagai warna negara; dan
		4. Terdapat sanksi hukuman untuk pihak yang melanggar

Semua orang bisa mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tertera dalam UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”16 Untuk mendapatkan perlindungan hukum, sesorang bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi kepada pihak yang berwenang dan bertugas untuk melindungi masyarakat yaitu aparat kepolisian.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian yang di mana dalam Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupaka alat negara uang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.17

16 Pasal 28 Huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

17 Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

# Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen

* 1. **Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.18 Begitu pula dalam Kamus Inggris- Indonesia yang mengartikan *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.19 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang- barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya.20

*Black’s Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: (1) *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or redale;* (2) *a natural person who use products for personal rather than business purpose*,21 atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) orang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa maksud atau menjual kembali;

(2) orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi dan bukan bisnis.

Mariam Darul Badrul Zaman mendefenisikan konsumen sebagai semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.22 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

18 A.S. Hornby, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1987), h. 183.

19 Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995),

h. 124.

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

21 Bryan A. Garner*, Black’s Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004),

Eight Edition, h. 335.

22 Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 48.

konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.23

*Bussines English Dictionary* menyebutkan bahwa *costumer* adalah *person or company which buys and uses goods and service*,24 dalam bahasa Indonesia berarti orang atau perusahaan yang membeli dan menggunakan barang dan jasa. Inosentius Samsul mengatakan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.25

Menurut Hornby, konsumen (*consumen*) adalah (1) orang yang membeli barang atau yang menggunakan jasa; (2) orang atau perusahaan yang memberli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; (3) sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; (4) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.

Berdasarkan dari beberapa definisi konsumen di atas, konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) batasan, yaitu:26

1. Konsumen komersil (*commercial consumen*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

23 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

24 Peter Colin, *Bussines English Dictionary*, (London: Linguaphone Institute Limited), h.

60.

25 Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab*

*Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 34.

26 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 13.

1. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan; dan
2. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

# Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait antara satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin yang sama, keduanya adalah kondisi yang sama, tetapi dilihat dari sudut yang berbeda.

# Hak Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas hak-hak yang sebagai berikut:27

* + - 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
			2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
			3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
			4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
			5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
			6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
			7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
			8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
			9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

27 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.

# Kewajiban Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Secara umum, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Selain hak-hak konsumen yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:28

* + - 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dasn prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
			2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
			3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
			4. Mengiktui upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

# Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlidungan Konsumen, konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.29 Perlindungan konsumen adalah segala

28 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

29 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.30

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlidungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam *Bussines English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers againt unfair or illegal traders.* Adapaun dalam *Black’s Law Dictionary*, konsumen memiliki arti *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, sampai dengan akibat-akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

* + 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
		2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang akan dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hal

30 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki sanksi pidana di dalamnya. Jadi, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan dari asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen yang berlaku dan/atau termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini terpaut dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlidungan Konsumen yang berbunyi: Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.31 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:32

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

31 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.

32 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.

1. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
4. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

# Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan [*Guidelines for Consumer Protection*](https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf). [*Guidelines for*](https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf)[*Consumer Protection*](https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf) adalah sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional antar sesama negara anggota dan juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen.

Di Indonesia sendiri, dasar hukum perlindungan konsumen yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha; Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; dan Sanksi.

Beberapa prinsip yang diatur dalam perlindungan konsumen tersebut antara lain adalah *negligence*, *breach of warranty*, dan *strict product liability*.33

1. Prinsip Taggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*). Sebuah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen;
2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*). Penerapan kewajiban yang bersifat mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya; dan

33 Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 83

1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut.

Di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya.34

Kesimpulannya, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, PBB juga telah mengeluarkan pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik mengenai perlindungan konsumen.

34 Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 23.

# Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diperlukan guna menghasilkan rasa nyaman untuk para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen pula wajib bersifat tidak berat sebelah serta wajib adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan uraian sebagai berikut:35

* + 1. Asas manfaat, yaitu asas yang mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
		2. Asas keadilan, adalah sebuah asas yang memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil;
		3. Asas keseimbangan, merupakan asas yang berfungsi memberikan keseimbangan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah serta harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;36

35 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

36 Yapiter Marpi, *Perlidungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), h.118.

* + 1. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu asas yang menjamin konsumen akan mendapat manfaat dari produk yang digunakan, dan juga produk tersebut tidak akan mengancam keselamatan konsumen; dan
		2. Asas kepastian hukum, yakni asas yang bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Pada dasarnya, setiap hal mau itu berupa Undang-Undang atau aturan yang lain yang diciptakan memiliki tujuannya masing-masing, begitu pula dengan perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindunga Konsumen, perlindungan konsumen sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:37

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

37 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
2. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
3. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

# Gambaran Umum Tentang Nasabah

* 1. **Pengertian Nasabah**

Nasabah atau dalam kata lain disebut dengan pelanggan berarti orang yang membeli atau menggunakan barang dan/jasa. Dalam bahasa Inggris, nasabah atau pelanggan disebut juga dengan *costumer*.

Spesifiknya, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.38 Nasabah dalam hal ini sebagai konsumen dalam jasa keuangan perbankan merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.39

38 Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

39 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Kasmir, nasabah adalah seorang konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Sedangkan Tjiptono berpendapat mengenai nasabah sebagai siapapun yang membeli dan menggunakan produk atau layanan bank.40

Saladin berpendapat bahwa nasabah adalah orang atau legal yang memiliki rekening tabungan atau pinjaman di bank. Sedangkan menurut Komaruddin nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro, deposito, atau deposito serupa lainnya di bank.

Pengertian nasabah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki arti yaitu pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).41

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

# Jenis-jenis Nasabah

40 Dwi Perwitasari Wiraningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, Volume 14 Nomor 2, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth, 2016, h. 50.

41 Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Telah diuraikan pada poin sebelumnya bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

* + 1. Nasabah Penyimpan. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;42 dan
		2. Nasabah Debitur. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.43

Berbeda pula nasabah dalam perbankan syariah. Pada undang-undang perbankan syariah, jenis nasabah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:44

1. Nasabah Penyimpan. Nasabah penyimpanan adalah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Investor. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan; dan

Syariah.

42 Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

43 Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

44 Pasal 1 Ayat (17-19) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

1. Nasabah Penerima Fasilitas. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

# Syarat Menjadi Nasabah

Nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa bank. Jika kita ingin menjadi nasabah di suatu bank, maka kita harus memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Saat ini, memiliki rekening di suatu bank sudah menjadi suatu kebutuhan untuk sebagian orang karena perkembangan teknologi yang terus terjadi membuat kita terbantu dengan kita memiliki rekening untuk mendukung aktivitas.

Berkenaan dengan syarat menjadi seorang nasabah pada suatu bank, biasanya tiap bank memiliki syarat-syarat spesifiknya masing-masing. Tetapi jika dilihat dari sisi umumnya, ada beberapa hal atau dokumen yang perlu disiapkan sebelum kita membuka rekening di bank, yaitu sebagai berikut:

* + 1. Membawa kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
		2. Membawa kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika ada;
		3. Menyediakan uang ganti materai; dan
		4. Membawa uang sebagai setoran awal yang biasanya sudah ditetapkan jumlah minimalnya oleh pihak bank.

Setelah semua dokumen untuk syarat membuka rekening telah disiapkan, selanjutnya calon nasabah sudah siap untuk membuka rekening baru dengan cara sebagai berikut:45

1. Datang ke bank terdekat dengan membawa persyaratan di atas;
2. Mengambil nomor antrian untuk menuju ke bagian *customer service*

(CS);

1. Mengisi formulir tentang data diri;
2. Setelah rekening selesai dibuat, jangan lupa meregistrasikan akun tersebut agar dapat diakses lebih cepat.

Dewasa ini, kita sebagai masyarakat bisa tetap membuka rekening tanpa pergi ke bank tujuan. Mengenai persyaratannya, hampir mirip dengan yang sudah dijelaskan di atas, yang membedakan hanya saja kita tidak datang ke bank yang dituju. Cukup mendaftarkan diri di rumah, tetapi mengambil kartu debitnya langsung ke bank yang bersangkutan.

1. **Gambaran Umum Tentang *Cybe Crime Hacking***
	1. **Pengertian *Cyber Crime Hacking***

Pada masa globalisasi saat ini, yang membawa kemajuan teknologi sangat pesat hingga perihal tersebut tidak terlepas terdapatnya efek dari penyalahgunaan dari pemanfaatan teknologi selaku kebutuhan data.

45 BRI, “Cara Buka Rekening Untuk Pertama Kali yang Perlu Diperatikan”, [https://promo.bri.co.id/main/promo/detail/ketahui\_syarat cara\_buka\_rekening\_untuk\_pertama\_](https://promo.bri.co.id/main/promo/detail/ketahui_syarat___cara_buka_rekening_untuk_pertama_kali_yang_perlu_diperhatikan) [kali\_yang\_perlu\_diperhatikan](https://promo.bri.co.id/main/promo/detail/ketahui_syarat___cara_buka_rekening_untuk_pertama_kali_yang_perlu_diperhatikan) , (diakses pada Minggu, 2 April 2023, pukul 13.24 WIB).

*Cyber crime* dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu *cyber* yang memiliki arti dunia maya dan *crime* yang berarti kejahatan. Dalam bahasa Indonesia, dunia maya berarti sebuah ruang informasi dan komunikasi dalam internet, sedangkan kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

*Cybercrime* adalah kegiatan yang tidak legal pada sesuatu sistem komputer yang masuk dalam jenis tindak kejahatan di dunia maya. Andi Hamzah mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.46

*Cyber crime is the latest and perhaps the most complicated problem in the cyber world*. *Cyber crime may be said to be those species, of which, genus is the conventional crime, and where either the computer is an object or subject of the conduct constituting crime*. *A generalized definition of cyber crime may be unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both*.47

Girasa mendefinisikan *cyber crime* sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Tavani memberikan definisi *cybercrime* sebagai kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.

h. 25.

46 Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana DIbidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),

47 Kamini Dasora, *Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions*, Volume 3

Nomor 1, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 2011, h. 242.

*Hacking* adalah aktifitas penyusupan ke dalam suatu sistem komputerr maupun jaringan dengan tujuan guna menyalahgunakan maupun mengganggu sistem yang ada. Dalam artian lain, *hacking* merupakan suatu aksi menciptakan titik entri yang barangkali terdapat dalam sistem komputer ataupun jaringan komputer dan sampai berhasil mengambil alih. Pada umumnya, *hacking* dicoba guna memperoleh akses tidak legal ke sistem komputer ataupun jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem ataupun mencuri data sensitif yang ada pada komputer.

*Hacking* atau peretasan merupakan kegiatan menerobos masuk secara ilegal ke program-program komputer milik pihak lain. Dalam melakukan peretasan tersebut tentu saja memiliki akibat yang cukup berbahaya. Beberapa hal yang dapat diretas ialah hal-hal terkait dengan informasi, harta seperti uang, dan berbagai kemungkinan informasi lain.48

*Hacking* adalah teknik yang dilakukan oleh orang untuk menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengkesploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem.

Dari pengertian *cyber crime* dan *haking* di atas, dapat disimpulkan bahwa *cyber crime hacking* adalah suatu aktifitas illegal pada suatu sistem komputer yang bertujuan untuk menyalahgunakan dan/atau mengganggu sistem yang ada di mana hal ini merupakan salah satu jenis tindak kejahatan dunia maya.

48 Abdul Razzaq Matthew Aditya. dkk, *Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)*, Volume 6 Nomor 1, Global Political Studies Journal, 2022, h. 37.

* 1. **Jenis *Cyber Crime***

*Cyber crime* merupakan kejahatan transnasional yang cukup berbahaya. Terdapat beberapa jenis *cyber crime* yang kerap terjadi dimasyarakat dan harusnya masyarakat lebih memperhatikan tentang hal tersebut, antara lain adalah:49

* + 1. *Hacking* merupakan suatu kegiatan menerobos masuk secara ilegal ke program-program komputer milik pihak lain;
		2. *Cracking* merupakan sebuah kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan;
		3. *Cyber sabotage* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu, merusak, dan/atau menghancurkan suatu data, program, atau system jaringan computer yang menjadi sasaran;
		4. *Cyber attact* merupakan sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan bertujuan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersedian (*availability*) informasi;
		5. *Carding* merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain; dan
		6. *Spyware* merupakan suatu program yang dapat merekam secara rahasia segala aktivitas online user.

49 Agus Subagya, *Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Synergy in Facing of Cyber Warfare Thread*, Volume 5 Nomor 1, Jurnal Pertahanan, 2015, h. 98.

Selain dari jenis-jenis *cyber crime* yang tertera di atas, penulis menemukan jenis-jenis *cyber crime* dari sumber lain, yaitu:50

1. *Identity threft* (pencurian identitas) adalah suatu kejahatan yang biasanya si pelaku akan menyalahgunakan identitas orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan finansial;
2. *Pishing* adalah salah satu *cyber crime* yang bertujuan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korbannya di mana kejahatan ini biasanya dilancarkan melalui email ataupun sosial media lainnya dengan mengirim link palsu atau membuat website bodong;
3. *Carding* adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain.
4. *Skimming* adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening;
5. *Deface website* (peretasan situs) dan email merupakan jenis kejahatan *cyber crime* dengan cara meretas sebuah situs ataupun email, serta mengubah tampilannya;
6. *Cyber espionagel* (mata-mata) adalah sebuah jenis kejahatan *cyber crime* yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer korban;

50 Cermati.com, *“14 Jenis Cybercrime Kejahatan Internet yang Merugikan”*, [https://www.cermati.com/artikel/jenis-cyber-crime,](https://www.cermati.com/artikel/jenis-cyber-crime) (diakses pada Rabu, 28 Desember 2022 pukul

19.07 WIB).

1. *SIM swap* adalah modus penipuan dengan mengambilalih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang dengan tujuan untuk meretas akun perbankan seseorang;
2. Penipuan online adalah pemakaian layanan internet ataupun aplikasi dengan akses internet untuk menipu ataupun mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri data personal, yang dapat memicu pencurian identitas;
3. *One Time Password Fraud* (*OTP fraud*) merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara peretasan atau pembajakan kode rahasia secara elektronik;
4. *Data forgery* (pemalsuan data) adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet;
5. Kejahatan konten ilegal adalah suatu kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, misalnya berita bohong atau fitnah;
6. Serangan *ransomware* adalah *software* jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tetapi juga apat menyandera data pengguna. Pelaku akan meminta uang tebusan kepada korban jika ingin *ransomware* dimusnahkan, jika korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi tidak bisa digunakan lagi.
7. *Cyber Terorism* (teroris dunia maya) adalah kejahatan yang mengusik ataupun membuat kehancuran terhadap sesuatu informasi

di jaringan komputer. pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki informasi tersebut yang telah disabotase dengan bayaran tertentu; dan

1. Menjiplak situs orang lain merupakan satu kejahatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) orang lain di internet.
	1. **Akibat Dari *Cyber Crime Hacking***

*Cyber crime* merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi saat ini, semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula keilmuan manusia. *Cyber crime* bisa dengan gampang terjadi saat dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang professional yang telah memiliki ilmu yang tinggi atas kemampuan *hacking*.

Setiap kejatah yang dilakukan pasti menimbulkan sebuat akibat yang merugikan salah satu pihak, di sini pihak yang dirugikan adalah korban, yaitu orang-orang yang terkena *hacking* oleh *hacker*. Ada beberapa akibat dari adanya *cyber crime hacking* yang marah terjadi, antara lain:

* + 1. Kehilangan data pribadi yang bersifat penting
		2. Kerusakan pada computer dan software
		3. Kehilangan sejumlah uang
		4. Turunnya reputasi online

Untuk meminimalisir terjadinya *cyber crime hacking*, kita sebagai masyarakat harus lebih *aware* tentang hal ini. Berikut adalah cara untuk meminimalisir terjadinya *cyber crime hacking* yang kerap terjadi, yaitu:

1. Tidak menggunakan software bajakan;
2. Jangan asal mengakses website;
3. Tidak mudan percaya dengan orang yang baru dikenal;
4. Jangan pernah membagikan data pribadi ke social media atau kepada orang yang tidak berkepentingan; dan
5. Tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun.